

- 02** GOVERNMENTTODAY
Pro-Kontra 4 Pulau Aceh Jadi Milik Sumut, Ada Migasnya?
- 05** HAJI 2025
BP Haji: Ada Wacana Kuota Haji 2026 Dikurangi 50%
- 10** LISTSTYLE
Warna Rambut Ombre ini Cerahkan Kulit Sawo Matang



Setengah Lusin Gol Jepang Hajar Indonesia

Timnas Indonesia kalah segalanya dari Jepang di matchday terakhir Kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Garuda bahkan tak mampu melakukan _shot on target_ di sepanjang laga. Bertandang ke Stadion Suita, Osaka, Selasa (10/6/2025), Timnas Garuda dipaksa menyerah 0-6 dari Jepang. Setengah lusin gol dari tim Negeri Sakura menjadi kekalahan terbesar tim Merah Putih di sepanjang Kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia harus berjuang di putaran keempat babak kualifikasi. Sementara Jepang sudah menyegel satu tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 sejak Maret lalu. (reuters)

KARPET MERAH BUMN ANTAM DI RAJA AMPAT

Pemerintah Cabut 4 Izin Perusahaan Tambang, Kecuali PT GAG Nikel

Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberi titah mencabut Izin Usaha Penambangan (IUP) 4 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan tersebut ditempuh di tengah riuh kontroversi tuduhan kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan nikel di surga penyelam Papua itu oleh sekelompok organisasi nirlaba, termasuk Greenpeace Indonesia. PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham dilarang mengeruk nikel lagi di Raja Ampat. Namun, ada satu perusahaan yang izinnya tidak dicabut yaitu PT GAG Nikel. Perusahaan tambang nikel milik PT Aneka Tambang (Antam) Tbk bak mendapat 'karpet merah' karena masih tetap dapat mengeruk nikel dengan luas wilayah 13.136 hektare di Pulau Gag. Antam dengan kode emiten ANTM merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor pertambangan bagian dari MIND ID. Alasan pemerintah, lokasinya jauh dari geopark dan perusahaan mematuhi aturan lingkungan hidup dan tata kelola limbah yang baik sesuai analisis mengenai dampak lingkungan hridup (Amdal). Diketahui, PT Gag Nikel mengeruk laba sebesar Rp819,77 miliar sepanjang periode 2021 dari konsesi tambang di Pulau Gag. Angka ini melompat 192,47% dibandingkan dengan posisi laba tahun buku 2020 sebesar Rp280,25 miliar.

Baca Hal 11...

Tampak lokasi terbuka penambangan PT GAG Nikel milik Antam yang sementara berhenti beroperasi di Pulau Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Minggu (8/6/2025). (ant.ist)



KONTRIBUSI PENERIMAAN NEGARAPAJAK DAN NON PAJAK PT GAG NIKEL (RP)

2021	2019
346.676.183.044	45.591.426.735
188.268.298.923	48.047.875.886
(Angka dalam Jutaan)	
40.109.117.737	Penerimaan Pajak
70.698.316.362	Penerimaan Non Pajak

KINERJA PRODUKSI PENJUALAN PT GAG NIKEL

2021	2021
3.000.000	819.773
3.000.761	1.769.189
(Angka dalam WMT)	
1.163.853	138.080
1.112.712	660.539

2020	2020
1.758.739	280.253
1.795.750	795.843
(Angka dalam Jutaan)	
Volume Produksi	Laba
Volume Penjualan	Pendapatan

PRO-KONTRA 4 PULAU ACEH JADI MILIK SUMUT, ADA MIGASNYA?

Empat pulau yang tadinya milik Aceh kini menjadi daerah Sumatera Utara (Sumut). Mencuat isu soal potensi minyak dan gas (migas) di pulau tersebut.

Mendagri Tito Karnavian memberikan penjelasan soal 4 pulau sengketa yang semula masuk Provinsi Aceh, kini diputuskan masuk Provinsi Sumatera Utara. Keempat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Besar, Pulau Lipan.

Tito mengatakan, Kemendagri terbuka apabila ada pihak yang keberatan jika empat pulau yang semula milik Aceh kini secara administratif ditetapkan masuk Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

"Mungkin ada pihak yang menerima, ada yang tidak menerima, kita paham lah," kata Tito kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

"Kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi, atau mungkin, kalau ada yang mau digugat secara hukum, ke PTUN misalnya, kita juga tidak keberatan," ungkapnya.

Keputusan 4 pulau itu masuk Provinsi Sumut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.

Tito membeberkan, batas darat antara Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah sudah disepakati dan ditandatangani oleh Pemprov Aceh dan Sumut.

Akan tetapi, batas laut belum mencapai kesepakatan sehingga kewenangan penentuannya diserahkan ke pemerintah pusat. Karena batas laut tidak pernah sepakat, sengketa 4 pulau terus berlanjut.

Masalah ini kemudian muncul dalam proses penamaan pulau untuk pemenuhan administrasi pendaftaran nama pulau ke PBB. Atas hal itu, pemerintah pusat mengambil alih persoalan tersebut.

"Nah tidak terjadi kesepakatan, aturannya diserahkan kepada pemerintah nasional, pemerintah pusat di tingkat atas," kata Tito.

Berdasarkan tarikan batas wilayah darat, pemerintah pusat pun



Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu temui Gubernur Aceh Muzakir Manaf soal status 4 pulau Aceh yang kini jadi milik Sumut sesuai surat keputusan Kemendagri pada Rabu (4/6/2025).
Foto: (Dok. Istimewa)

memutuskan 4 pulau ini masuk ke wilayah administrasi Sumatera Utara.

"Nah, dari rapat tingkat pusat itu, melihat letak geografisnya, itu ada di wilayah Sumatera Utara, berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 Pemda, Aceh maupun Sumatera Utara," tuturnya.

Usulan Dikelola Bersama

Tito menambahkan, pihaknya merespons positif wacana Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bila ingin mengelola potensi sumber daya di sana bersama Pemprov Aceh.

"Sangat bagus. Saya nggak mendengar ada migas. Saya belum pernah dengar ini, baru dengar ini," kata Tito.

Meski begitu, Tito menyatakan

dukungan penuh jika inisiatif datang dari pemerintah daerah sendiri.

"Jadi itu sangat bagus kalau seandainya dari bawah sendiri menyelesaikan, kita dari pusat senang sekali. Itu maunya kita dalam setiap penyelesaian batas wilayah kita selalu berusaha agar ada win-win antara pihak daerah-daerah yang berbatas. Selalu, selalu,"

Tito menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Mendagri, pemerintah telah menyelesaikan ratusan kasus batas wilayah tanpa konflik. Kunci penyelesaian, menurutnya, adalah mediasi dan kesepakatan antar-daerah.

"Dan kita pada saat di masa saya hampir 300an lebih diselesaikan batas

wilayah tanpa ada masalah, tanpa ada konflik," katanya.

Maka dari itu, Tito menyambut bahwa baik jika Aceh maupun Sumatera Utara telah menyepakati batas darat dengan mengelola SDA bersama. Karena itu, ia mempersilakan kepala daerah melanjutkan dialog untuk mengelola potensi sumber daya bersama.

"Jadi, kalau misalnya Pak Gubernur, Pak Bobby, dan Pak Muzaki Manaf berdialog untuk mengelola bersama, why not? Kami akan sangat senang sekali. Kita pasti akan mendukung. Karena kami nggak punya kepentingan selain adanya kepastian daerah itu," katanya.

Usulan ini sebelumnya disampaikan Bobby saat bertemu Gubernur Aceh Muzakir Manaf di kantornya pada Rabu (4/6/2025) membahas 4 pulau Aceh yang menjadi milik Sumatra Utara berdasarkan keputusan Mendagri.

"Namun di luar itu, tadi kami (bersama Gubernur Aceh) bersepakat untuk kita kelola sama-sama. Walaupun ada potensi sumber daya alam, ya itu bisa kita kelola sama-sama. Termasuk ada Migas (minyak dan gas), juga bisa kita saling berbagi," kata Bobby dalam pertemuan itu. (qid,rls,kum/dya)

Bisa Picu Ketegangan, Didesak Dikembalikan

ANGGOTA Komisi II DPR Deddy Yevri Sitorus menilai tidak ada urgensi pemerintah terkait kepemilikan empat pulau dari Aceh ke Sumut.

"Tidak ada urgensi untuk memindahkan kepemilikan 4 pulau itu ke Sumut," kata Deddy, Selasa (10/6/2025).

Menurut Deddy, kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan ketegangan antar provinsi.

"Bahkan kontraproduktif karena menimbulkan potensi ketegangan antar provinsi dan Aceh dengan Pusat," ujar Ketua DPP PDIP ini.

Di sisi lain, Deddy juga berpandangan bahwa tidak ada dasar hukum untuk mengurus pulau-pulau secara kolaboratif sebagaimana diwacanakan Gubernur Sumut Bobby Nasution.

"Tidak ada alas hukum untuk

mengurus pulau-pulau itu secara kolaboratif seperti yang diwacanakan Gubsu. Usulan itu cenderung cara pandang pengusaha dan menunjukkan pola pikir yang sangat eksploitatif," pungkasnya.

Terpisah, Anggota DPD Sudirman Haji Uma meminta Mendagri mengembalikan kepemilikan empat pulau itu ke Tanah Rencong.

"Kami meminta Menteri Dalam Negeri untuk menghargai marwah Aceh, mematuhi kesepakatan yang telah ada, dan tidak mengambil langkah-langkah sepihak yang justru berpotensi merusak hubungan baik antar provinsi," kata Haji Uma dalam keterangannya.

Haji Uma menyebutkan pentingnya semua pihak untuk merujuk pada perjanjian tahun 1992 yang menjadi acuan resmi penyelesaian batas wilayah antara

Aceh dan Sumatera Utara. Dia menyerukan Pemerintah Sumut menghormati kedaulatan batas wilayah Aceh dan tidak memperkeruh situasi dengan wacana baru yang tidak berdasar hukum.

"Kami sedang menuntut Kemendagri untuk bertindak tegas mengembalikan pulau-pulau itu kepada Aceh. Kami juga berharap Sumut menghargai marwah pulau Aceh, taat pada kesepakatan 1992 dan menjaga keharmonisan antar provinsi bertetangga," jelas Haji Uma.

"Atas dasar apa Pemerintah provinsi Sumut mencetuskan pengelolaan bersama? Yang kami perjuangkan adalah pengembalian kedaulatan dan kejelasan status, bukan kompromi yang mengaburkan wilayah. Ini bukan amanah rakyat Aceh," lanjut Haji Uma. (wid,rls,dtc/dya)

DPR WANTI-WANTI TNI TAK GEGABAH REKRUT 24 RIBU TENTARA

Rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) membentuk batalyon teritorial pembangunan dengan menyiapkan rekrutmen 24 ribu tamtama disoroti. Komisi bidang pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI minta proses harus hati-hati.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono mewanti-wanti TNI untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menindaklanjuti rencana itu. "TNI memiliki tugas utama sebagai alat pertahanan negara dan setiap kebijakan yang melibatkan rekrutmen prajurit harus tetap berpegang pada prinsip profesionalisme dan kesiapan tempur," ujar Dave Selasa (10/6/2025).

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wahyu Yudha sebelumnya mengatakan bahwa prajurit yang direkrut bukan untuk kepentingan tempur, melainkan akan difokuskan pada kegiatan seperti ketahanan pangan dan pelayanan kesehatan.

Menurut Dave, rencana pembentukan batalyon teritorial pembangunan merupakan inisiatif TNI yang sejalan dengan visi pemerintah untuk memperkuat sektor pangan dan kesehatan. Dave menganggapnya sebagai bentuk kontribusi TNI dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kendati begitu, Dave menekankan bahwa evaluasi secara berkala harus dilakukan untuk memastikan kesuksesan program dengan manfaat yang dirasakan pemerintah tanpa mengorbankan kesiapan dan kemampuan pertahanan negara.

Dave menyebut Komisi I akan terus berkomunikasi dengan TNI AD serta pemerintah untuk mengawasi implementasi program ini agar berjalan sesuai koridor hukum.

"Kami akan memastikan bahwa perekrutan 24 ribu calon tamtama ini tidak menggeser fokus utama TNI sebagai institusi pertahanan," ucapnya. "Serta tidak menimbulkan tumpang tindih dengan tugas-tugas yang seharusnya menjadi ranah Reformasi Sederajat Semangat Reformasi

Adapun rencana pembentukan batalyon teritorial ini dikecam oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Koalisi memandang kebijakan ini

menyimpang dari mandat utama TNI sebagai alat pertahanan negara sebagaimana yang diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang TNI.

TNI direkrut, dilatih, dan dididik untuk perang. Bukan untuk mengurus urusan-urusan di luar perang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan," ujar koalisi dalam pernyataan pers pada Senin, 9 Juni 2025.

"Hal ini tentu mencederai semangat Reformasi TNI yang menginginkan terbentuknya TNI yang profesional dan tidak lagi ikut-ikutan mengurus urusan sipil," kata Direktur Imparsial Ardi Manto mewakili koalisi, dalam keterangan yang diterima,



Kodim Wonosobo dan Bulog turun langsung ke sawah, serap gabah petani. (Dok. Kodim Wonosobo)

Selasa (10/6/2025)

Koalisi menyebut perekrutan dan pelibatan TNI dalam urusan pertanian, perkebunan, peternakan, dan pelayanan kesehatan sebagai bentuk kegagalan dalam menjaga batas demarkasi antara urusan sipil dan militer. Merujuk pada UUD 1945 dan UU TNI, pembatasan terhadap TNI jelas adanya sehingga TNI tak memiliki kewenangan untuk turun tangan dalam urusan-urusan sipil tersebut.

Menurut mereka, kompleksitas ancaman perang yang semakin modern sejatinya menuntut TNI untuk fokus memperkuat kapasitas tempur, bukan justru dilebur dalam kegiatan non-militer yang menjadi ranah sipil.

Hal ini dinilai mencederai semangat reformasi TNI yang memiliki cita-cita atas profesionalisme TNI dan nihilnya campur tangan TNI atas urusan sipil.

Koalisi mendesak presiden dan DPR untuk mengawasi dan mengevaluasi kebijakan yang dinilai telah mengingkari jati diri TNI. (din,rls,ist,kcm/dya)

TNI AD: Animo Tinggi

KEPALA Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana menuturkan, rekrutmen besar-besaran ini dilakukan dengan alasan semakin tingginya minat generasi muda untuk menjadi TNI.

Bahkan, lanjut Wahyu, realisasi penerimaan prajurit TNI AD selama lima tahun terakhir selalu melampaui target, dengan capaian tertinggi 114,4 persen pada 2023. "Perlu saya jelaskan bahwa animo pemuda Indonesia untuk menjadi prajurit TNI AD justru terus meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun," ujar Wahyu, Selasa (3/6/2025) malam.

"Hal ini tecermin dari data pendaftaran calon tamtama tahun 2025 yang mencapai 107.365 orang, dengan jumlah calon tervalidasi sebanyak 38.835 orang," lanjut dia.

Wahyu pun menegaskan bahwa rekrutmen 24.000 prajurit tersebut bukan dilakukan secara mendadak, melainkan hasil dari perencanaan jangka panjang yang terukur.

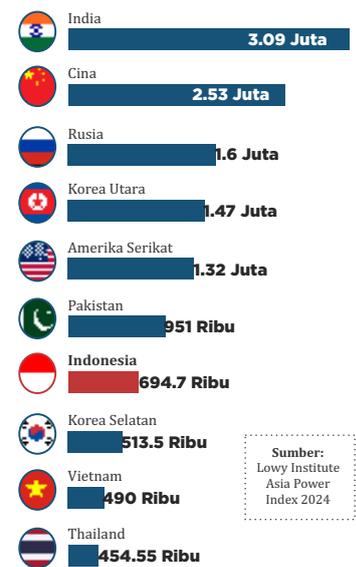
Para prajurit yang hendak

direkrut itu tidak dipersiapkan untuk bertempur. Mereka dihadirkan guna menjawab kebutuhan di tengah masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan. Menurut Wahyu, rekrutmen ini sejalan dengan arah kebijakan pertahanan negara yang tercantum dalam Doktrin Pertahanan Negara 2023, yakni membangun sistem pertahanan mandiri, kuat, dan berbasis kewilayahan.

Sebagai bagian dari implementasinya, TNI AD akan membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. "Setiap batalion nantinya akan berdiri di lahan seluas 30 hektar, dan akan memiliki kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat," kata Wahyu.

Menurut rencana, Batalyon Teritorial Pembangunan akan memiliki empat kompi, yakni: Kompi Pertanian, untuk mendukung ketahanan pangan nasional; Kompi Peternakan, guna memperkuat penyediaan protein hewani; Kompi Medis, sebagai garda depan

NEGARA & JUMLAH TENTARA TERBANYAK DUNIA



pelayanan kesehatan masyarakat dan penanganan bencana; terakhir Kompi Zeni, yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah tertinggal dan rawan bencana.

"Dengan pendekatan ini, prajurit TNI AD tidak hanya dituntut siap tempur, tetapi juga menjadi kekuatan pembangunan yang hadir dan bermanfaat langsung di tengah masyarakat," ucap Wahyu. (wid,kcm,rls/dya)

MENDADAK KPK USUL KENAIKAN GAJI KEPALA DAERAH

Selain upah yang terlalu kecil, pembiayaan politik yang relatif tinggi menjadi masalah ketika calon kepala daerah menjalankan kontestasi politik. KPK pun mengusulkan kenaikan gaji kelompok tersebut.

Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya H. Harefa mendorong pemerintah pusat menaikkan gaji para kepala daerah. Upah pemimpin daerah yang terlalu kecil dinilai salah satu penyebab mereka terlibat dalam tindak pidana korupsi (tipikor).

"Kalau masih seperti itu sulit juga, melihat kenapa sih orang kok mau tertarik (korupsi), pasti ada sesuatu yang lain, iya lah wong penghasilannya hanya segitu, kenapa dia tertarik ke situ," kata Cahya seperti dikutip pada Selasa (10/6/2025).

Cahya menjelaskan masih ada kepala daerah yang hanya mendapat gaji Rp5,9 juta sampai Rp6 juta per bulan. Selain upah yang terlalu kecil, dia menilai pembiayaan politik yang relatif tinggi menjadi masalah ketika calon kepala daerah menjalankan kontestasi politik.

"Proses pemilihannya karena kalau biaya politik masih tinggi itu akan problem terus. Misalnya, yang per suara Rp10 ribu, dulu kami dorong untuk pembiayaan partai politik," jelas dia.

Menurut dia, dengan pemerintah menaikkan gaji kepala daerah, hal ini dapat mencegah kasus korupsi secara holistik yang kerap melibatkan para pejabat daerah. "KPK juga berupaya mendorong perbaikan tata kelola, pembangunan ekonomi daerah, dan menjadi teladan kepemimpinan yang berintegritas di daerah," kata dia.

Dia mengatakan ada lima pegawai KPK yang ditempatkan sebagai penjabat (pj) untuk mewujudkan kepemimpinan yang bersih dari korupsi. Dia menilai penugasan tersebut telah tertuang pada Undang-Undang tentang KPK.

"Langkah ini bukan sekadar mandat administratif, tetapi wujud nyata komitmen pemerintah untuk menghadirkan kepemimpinan yang bersih, berintegritas, dan membawa semangat antikorupsi hingga ke level paling dekat dengan masyarakat," ujar dia.

Ia membeberkan, ada kepala daerah yang hanya mendapat gaji Rp 5,9 sampai Rp 6 juta per bulan. Selain upah yang terlalu kecil, pembiayaan politik yang relatif tinggi menjadi



Sekjen KPK Cahya Harefa menyoroti rendahnya gaji kepala daerah yang tak sebanding dengan ongkos politik. (Ist)

masalah ketika calon kepala daerah menjalankan kontestasi politik.

Ketika memimpin daerah masing-masing, kepala daerah dan wakilnya akan mendapatkan gaji, tunjangan jabatan, hingga dana operasional setiap bulan.

Menurut aturan, gaji pokok kepala daerah provinsi atau gubernur adalah Rp3 juta per bulan sedangkan wakil gubernur Rp2,4 juta per bulan.

Selain gaji pokok, gubernur dan wakilnya juga mendapat tunjangan jabatan, sebagaimana sudah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68

Tahun 2001.

Pasal 1 ayat (2) pada keppres tersebut menjelaskan tunjangan jabatan gubernur sebesar Rp5,4 juta dan wakil gubernur Rp4,32 juta.

Sementara itu, kepala daerah kabupaten/kota atau bupati dan wali kota mendapatkan gaji sebesar Rp2,1 juta per bulan. Sementara itu, wakilnya menerima Rp1,8 juta per bulan.

Sama seperti gubernur, kepala daerah kabupaten atau kota juga mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp3,78 juta sedangkan wakilnya menerima Rp3,24 juta.

Pengamat: Gagasan Keliru

PENELITI Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, heran dengan usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar gaji para kepala daerah naik untuk mencegah tindak pidana korupsi. Gagasan itu dinilai keliru.

Herdiansyah menilai usulan menaikkan gaji kepala daerah tidak menyelesaikan masalah utama dalam pemberantasan praktik korupsi.

"Ada semacam kegagalan menangkap apa sebenarnya problem mendasar dari perkara korupsi yang kerap kali melibatkan kepala daerah," kata Herdiansyah saat dihubungi, Selasa (10/6/2025).

Ia mengatakan menaikkan gaji kepala daerah berapa pun tidak akan pernah menyelesaikan problematik korupsi yang sering terjadi. Ia menilai untuk mencegah korupsi seharusnya dimulai dari menyelesaikan akar masalah di hulu, bukan malah dengan menaikkan gaji.

"Kalau gagasan menaikkan gaji ini kan melihat tidak pada akar masalahnya tapi lebih melihat fenomena atau dampaknya. Jadi tidak bisa menyelesaikan masalah," katanya.

Ia mengatakan akar masalah korupsi dimulai dari proses keterpilihan kepala daerah yang menelan biaya yang sangat besar. Biaya politik yang mahal pada akhirnya memaksa kepala daerah mencari pembiayaan ketika terpilih.

Dalam berbagai riset, untuk menjadi bupati, kandidat harus menghabiskan anggaran Rp20-30 miliar. Sedangkan untuk pemilihan gubernur menghabiskan biaya Rp50-150 miliar.

"Bayangkan cost politic yang besar ini pada akhirnya menyandera kepala daerah sehingga tidak ada pilihan lainnya selain korupsi kan. Menjarah, merampok uang negara untuk mengembalikan modal politik sebelumnya. Kan itu menjadi problem," katanya.

Ia menilai sepanjang biaya politik masih tinggi, maka persoalan korupsi tetap menghantui. Sehingga, ia menilai salah satu masalah yang harus dijawab adalah bagaimana meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Masyarakat tidak boleh dibawa ke dalam alam pragmatis yang hanya melihat dari keuntungan yang

Kepala daerah mendapatkan dukungan dana untuk menjalankan tugasnya melalui biaya operasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2020.

Dana operasional ini mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan rumah tangga dan inventaris rumah jabatan, pemeliharaan kendaraan dinas dan kesehatan, hingga perjalanan dinas, pakaian dinas, dan biaya penunjang operasional lainnya. (wid,rls,kcm/dya)

Berikut rinciannya biaya penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi serta kabupaten/kota.

Gubernur dan wakil gubernur:

- PAD Rp0-15 miliar: Rp150 juta hingga 1,75 persen dari total PAD
- PAD Rp15-50 miliar: Rp262,5 juta hingga 1 persen dari total PAD
- PAD Rp50-100 miliar: Rp500 juta hingga 0,75 persen dari total PAD
- PAD Rp100-250 miliar: Rp750 juta hingga 0,40 persen dari total PAD
- PAD Rp250-500 miliar Rp1 miliar hingga 0,25 persen dari total PAD
- PAD di atas Rp500 miliar paling rendah Rp1,25 miliar dan paling tinggi sebesar 0,15 persen dari total PAD

Wali kota-wakil wali kota dan bupati-wakil bupati:

- PAD Rp0-15 miliar: Rp150 juta hingga 1,75 persen dari total PAD
- PAD Rp15-50 miliar: Rp262,5 juta hingga 1 persen dari total PAD
- PAD Rp50-100 miliar: Rp500 juta hingga 0,75 persen dari total PAD
- PAD Rp100-250 miliar: Rp750 juta hingga 0,40 persen dari total PAD
- PAD Rp250-500 miliar Rp1 miliar hingga 0,25 persen dari total PAD
- PAD di atas Rp500 miliar paling rendah Rp1,25 miliar dan paling tinggi sebesar 0,15 persen dari total PAD

diperoleh saat mereka memilih. Tapi, melihat pada ide dan gagasannya.

"Kalau kemudian IQ politik masyarakat sudah bertumbuh dengan baik, memilih karena gagasan saya yakin modal politik juga bisa ditekan," kata dia.

KPK mencatat sejak tahun 2024 hingga Mei 2025 telah menjerat 363 anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, ada juga sebanyak 201 kepala daerah mulai dari Wali Kota hingga Gubernur yang terjerat kasus korupsi.

"Kalau kita melihat data dari 2024 sampai dengan Mei 2025, KPK telah menjerat sejumlah 363 anggota DPR dan DPRD, 171 Bupati dan Wali Kota, dan 30 Gubernur," kata Jubir KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (21/5/2025). (wid,ist/dya)



BP HAJI: ADA WACANA KUOTA HAJI 2026 DIKURANGI 50%

Saudi Arabia Railways (SAR) mengangkut sekitar 1,87 juta penumpang, termasuk jamaah dan petugas haji pada saat musim haji 2025. (gzt.ist)

Pemerintah Indonesia sedang melakukan negosiasi terkait kuota haji 2026. Pasalnya dikabarkan Arab Saudi akan mengurangi hingga 50% atau hanya separuh dari jumlah tahun ini yang sebanyak 221.000 jamaah.

Ketua Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf mengatakan ada wacana pengurangan kuota haji Indonesia hingga 50 persen. BP Haji mulai meminta kepastian kuota haji Indonesia untuk tahun 2026. Menurutnya kuota ini biasanya ditetapkan setelah musim haji selesai.

"Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Saat ini kami sedang melakukan negosiasi, karena manajemen haji untuk tahun depan akan beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji, dan akan ada sistem manajemen baru yang kami sampaikan," kata Irfan, Selasa (10/6/2025) dalam keterangan tertulis.

Irfan mengatakan ia sudah menggelar pertemuan dengan Deputy Menteri Haji Arab Saudi pada Selasa (10/6/2025) di Jeddah, Arab Saudi. Kuota haji ini turut yang jadi bahasan pertemuan selain dengan evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini.

Pemerintah Arab Saudi menurutnya juga mendorong pembentukan gugus tugas bersama Indonesia untuk mempersiapkan haji 2026. Kolaborasi ini ditujukan untuk memastikan akurasi data jamaah, terutama terkait aspek kesehatan, penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Masalah transportasi dan tenda di Arafah, Mina dan Muzdalifah kembali jadi sorotan. Jamaah haji Indonesia ada yang terlambat diangkut ke Arafah. Selain itu tenda di Mina juga dianggap kurang layak. Layanan syarikah atau perusahaan swasta penyedia layanan juga dianggap tidak

optimal.

Irfan mengatakan dalam diskusi tersebut, pemerintah Saudi menyoroti kurangnya transparansi data kesehatan jamaah. Misalnya ada jamaah yang meninggal saat masih di pesawat dan terpaksa tetap diangkut ke tanah suci.

Irfan melanjutkan Pemerintah Arab Saudi juga akan menerapkan sejumlah kebijakan baru, di antaranya pembatasan jumlah syarikah atau perusahaan penyelenggara layanan haji. Jumlah syarikah akan dibatasi maksimal dua perusahaan. Selain itu ada pengetatan standar kesehatan jamaah, pengawasan standar hotel, porsi makanan, hingga jumlah kasur perjamaah.

"Seluruh elemen ini akan dikontrol

katanya.

Irfan mengatakan Pemerintah Arab Saudi juga menetapkan bahwa pelaksanaan DAM atau denda haji hanya diperbolehkan di dua tempat, yakni di negara asal atau di Arab Saudi melalui perusahaan resmi yang ditunjuk kerajaan, yaitu Ad-Dhahi. Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi.

Belum ada pernyataan dari Arab Saudi perihal wacana pengurangan kuota haji hingga 50 persen ini.

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Akhmad Fauzin menyampaikan, proses kepulangan jamaah haji 1446 Hijriah akan dimulai pada Rabu (11/6/2025).

oleh task force Indonesia-Saudi,"

"Fase pemulihan jamaah ke Tanah Air akan dimulai pada 11 Juni 2025," ujar Fauzin dalam konferensi pers di Mekkah yang disiarkan secara daring melalui YouTube Kemenag RI, Selasa (10/6/2025).

Untuk itu, Fauzin meminta kepada seluruh jamaah untuk mempersiapkan diri dengan menjaga kondisi kesehatan agar tetap fit.

"Setiap jamaah diharapkan mempersiapkan diri dengan baik, termasuk menjaga kesehatan agar tetap fit hingga proses pemulihan selesai," ujarnya.

Fauzin menuturkan, PPIH Arab Saudi yang bekerja sama dengan maskapai akan melaksanakan proses penimbangan barang bawaan secara bertahap. Jamaah diminta memperhatikan batas maksimal berat barang dan ketentuan maskapai penerbangan. (wid,ist,rls,ini/dya)

Usulan Perubahan RUU Haji

PEMERINTAH bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyiapkan revisi dua undang-undang berkaitan dengan haji. Wakil Ketua Komisi VIII DPR dan anggota Tim Pengawas atau Timwas Haji DPR Abidin Fikri mengatakan kedua undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah atau UU Haji serta Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.

Dalam pertemuan itu, Menhub dDia mengatakan pemerintah dan DPR menilai revisi kedua undang-undang tersebut menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan ekosistem haji Indonesia yang adaptif terhadap kebijakan terbaru dari pemerintah Arab Saudi.

"Dua undang-undang ini akan diubah secara sinergis. Kami perlu mendalami lebih jauh agar revisi yang dilakukan bisa menyesuaikan dengan kebijakan terbaru dari Arab Saudi, termasuk soal visa nonhaji yang kini dilarang masuk ke kota suci," ujar Abidin dalam keterangannya dikutip Selasa (10/6/2025).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyebutkan kebijakan Arab Saudi dalam pembatasan jamaah nonhaji yang datang ke Tanah Suci tahun ini patut menjadi perhatian. Banyak kasus deportasi hingga penahanan jamaah karena penggunaan visa yang tidak sesuai.

Menurut dia, hal ini menjadi sinyal penting penyelenggaraan haji Indonesia harus lebih adaptif dan terstruktur dari sisi regulasi untuk menjawab perubahan yang dilakukan Arab Saudi. "Karenanya, UU Penyelenggaraan Haji dan UU Pengelolaan Keuangan Haji akan kami revisi dengan mempertimbangan dinamika ini," ujarnya.

Abidin juga menekankan pentingnya reformasi dalam pengelolaan keuangan haji. Dia mendorong agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa menghadirkan terobosan dalam bentuk investasi memenuhi prinsip syariat Islam yang secara langsung menguntungkan ekosistem haji, yang mencakup layanan perhotelan, transportasi, hingga konsumsi.

Haji Furoda dan Syarikah Masuk RUU Haji

Anggota Timwas Haji DPR Marwan Dasoq mengatakan masih banyak jamaah calon haji Indonesia yang berangkat melalui jalur haji furoda belum memperoleh visa meski waktu telah mendekati puncak ibadah haji.

Marwan mengatakan prosedur yang diterapkan otoritas Kerajaan Arab Saudi pada ibadah haji kali ini jauh lebih ketat dari tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, pada tahun berikutnya, DPR dan pemerintah akan berupaya mengantisipasi terjadinya kembali polemik ini.

"Soal furoda tentu dipertimbangkan untuk masuk pada bahasan revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU)," kata Marwan.

Dia menegaskan DPR sedang mendorong agar warga negara yang berangkat haji lewat jalur nonkuota tetap mendapatkan perlindungan hukum dan layanan yang layak. (wid,ist,tmo/dya)

Pemkot Malang Rehabilitasi 88 Korban Terindikasi TPPO

MALANG - Pada paruh pertama 2025, Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang melakukan rehabilitasi terhadap 88 calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Dari penyelidikan kepolisian, mereka diduga terindikasi menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Ada dua kejadian. Yang beberapa waktu lalu 40 dan sekarang 48," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito, dikonfirmasi melalui sambungan selular, Selasa (10/6/2025).

Donny menjelaskan, lembaganya berperan dalam penanganan pasca kejadian. Setelah proses operasi dilakukan pihak kepolisian, Dinsos mengambil alih untuk melakukan asesmen dan rehabilitasi dasar kepada para CPMI yang ditempatkan sementara di safe house.

"Proses pengungkapannya dilakukan oleh Polresta. Kami menangani pascanya, mulai dari pendataan, asesmen psikososial, sampai membantu proses pemulangan," kata Donny.

Dari catatan Dinsos, Donny menyampaikan para korban berasal

dari berbagai daerah, bukan warga Kota Malang. Namun karena diamankan di wilayah Kota Malang dan safe house tersedia di bawah pengelolaan Dinsos, maka penanganan awal dilakukan oleh instansinya.

"Seingat saya, tidak ada warga Kota Malang di antara mereka. Kami hanya membantu proses asesmen dan fasilitas safe house, lalu kami bantu koordinasi untuk pemulangannya ke daerah asal mereka," jelasnya.

Dalam proses asesmen, Dinsos menggali kondisi psikososial korban untuk mengetahui apakah ada trauma atau tekanan psikologis akibat pengalaman mereka.

Namun dari hasil asesmen, menurutnya sebagian besar CPMI menyatakan tidak mengalami kekerasan fisik, melainkan hanya merasa tertipu oleh iming-iming pekerjaan di luar negeri.

"Mereka umumnya menyampaikan ingin meningkatkan pendapatan, dan tertarik bekerja ke luar negeri. Namun kemudian menyadari bahwa mereka telah ditipu," ungkap Donny.

Setelah menjalani asesmen, Dinsos melaporkan hasil temuan kepada pihak kepolisian untuk

ditindak-lanjuti. Penentuan apakah korban dapat segera di-pulangkan atau perlu perlakuan lebih lanjut, menurutnya juga tetap menjadi kewenangan Polresta.

"Dari 48 orang yang terakhir kami tangani, tidak ada yang membutuhkan penanganan lanjutan ke psikolog ataupun Dinsos Provinsi. Rata-rata pulang sendiri atau dijemput keluarganya," tambah Donny.

Ia juga menegaskan, keterlibatan Dinsos dalam kasus ini berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar korban adalah perempuan. Yang secara kelembagaan menjadi ranah kerja dinas dalam upaya perlindungan kelompok rentan.

"Kalau secara fungsional, untuk pekerja migran itu kan sebenarnya ranah Disnaker. Tapi karena ini menyangkut perempuan dan ada



Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito. (Santi/Lentera)

indikasi TPPO, serta kami memiliki fasilitas safe house, maka kami ikut menanganinya," terang Donny.

Koordinasi erat dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang Kota menjadi kunci dalam penanganan kasus. "Yang jelas, peran kami di sisi perlindungan, asesmen, dan rehabilitasi dasar. Selanjutnya, kami berkoordinasi dengan provinsi jika diperlukan untuk pemulangan lintas wilayah," ucapnya. (Santi/Dya)

Migrasi Pembayaran Gaji 9.000 PPPK ke BPR Artha Kanjuruhan Ditarget Rampung Oktober



(Ilustrasi) PPPK Kabupaten Malang usai menjalani pelantikan. (dok. Prokopim Kab Malang)

MALANG- Pembayaran gaji bagi 9.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lewat Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Artha Kanjuruhan, ditargetkan selesai pada Oktober 2025.

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Tetuko Luhur Setyo Bathoro, mengungkapkan saat ini BPR Artha Kanjuruhan masih mempersiapkan sistem digitalisasi pembayaran gaji PPPK. Penyesuaian sistem ini

ditargetkan rampung dalam dua bulan ke depan.

"Selama dua bulan ini kita kebut persiapan sistemnya. Minimal Agustus-September sudah siap. Karena pada 1 Oktober nanti PPPK formasi tahun 2024 tahap dua akan dilantik. Saat itu juga akan langsung dimigrasi sistem gajinya ke BPR Artha Kanjuruhan," ujar Tetuko, Selasa (10/6/2025).

Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang berharap migrasi payroll ke salah satu BUMD tersebut, dapat menjadi strategi dalam mendorong pemulihan kinerja BPR Artha Kanjuruhan.

Lebih lanjut, Tetuko menyebutkan jumlah PPPK yang akan dimigrasi sistem penggajiannya mencapai hampir 9.000 orang. Angka ini berasal dari akumulasi pengangkatan PPPK Pemkab Malang formasi tahun 2021

hingga 2024.

"Untuk formasi tahun 2024 saja, sebanyak 6.178 pegawai non-ASN telah dilantik dalam dua tahap. Jadi yang sudah pada 2 Juni 2025 kemarin ada 3.850. Sisanya, 2.328 akan menyusul pada Oktober nanti," jelas Tetuko.

Sementara untuk formasi tahun 2023, sebanyak 2.320 pegawai telah lebih dahulu dilantik pada 31 Mei 2023 lalu. Hingga saat ini, menurutnya pembayaran gaji PPPK masih dilakukan melalui Bank Jatim.

Namun ke depan, BPR Artha Kanjuruhan ditunjuk sebagai bank penyalur yang akan mengelola seluruh sistem penggajian berbasis digital. "Kalau semua sudah siap, maka kita pindah total ke BPR Artha Kanjuruhan. Sekitar 9.000 PPPK itu nantinya terima gaji langsung lewat sistem digital dari BPR," imbuh Tetuko.

Pria yang juga menjabat sebagai Pembina BUMD Pemkab Malang ini menegaskan, digitalisasi sistem penggajian ini akan memudahkan proses distribusi gaji. Karena semuanya dilakukan secara otomatis. "Jadi sudah tidak ada input manual. Sistem ini akan mengalir langsung ke rekening pegawai," katanya.

Langkah ini pun diyakini akan membawa dampak positif terhadap BPR Artha Kanjuruhan. Yang sempat mengalami kendala keuangan beberapa waktu lalu. Dengan mengelola gaji PPPK, menurutnya perputaran dana di bank daerah tersebut akan meningkat signifikan.

Hal ini juga diakui Direktur Utama BPR Artha Kanjuruhan, Santoso. Ia mengungkapkan, kebijakan migrasi gaji PPPK ini dapat menjadi momentum pemulihan keuangan BPR Artha. Ia memproyeksikan perputaran dana dapat mencapai miliaran rupiah hanya dari 1.000 pegawai PPPK.

"Asumsinya jika 1.000 pegawai digaji rata-rata Rp2,5 juta, itu sudah ada Rp2,5 miliar dana yang berputar di bank. Efeknya domino, karena dari dana tersebut kita bisa mengelola pembiayaan yang berisiko rendah dan menghasilkan pendapatan," tutur Santoso.

Santoso juga mangku siap dalam mendukung penuh kebijakan ini. Dirinya optimistis dapat menjalankan sistem ini dengan aman. Serta menjamin distribusi dana yang cepat dan tepat melalui digitalisasi sistem yang ada. (Santi/Dya)

USAI DI TAHAN ISRAEL, AKTIVIS GRETA THUNBERG DIDEPORTASI

Israel mengatakan aktivis Greta Thunberg, asal Swedia telah meninggalkan negara itu dengan penerbangan menuju ke Prancis. Thunberg diterbangkan dari Israel usai sempat ditahan bersama belasan aktivis lainnya menuntut pencegahan terhadap kapal Madleen yang berlayar menuju ke Jalur Gaza.

Greta Thunberg telah meninggalkan Israel dengan penerbangan ke Prancis," kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir AFP, Selasa (10/6/2025).

Kementerian Luar Negeri Israel menyertakan dua foto yang menunjukkan Thunberg di dalam pesawat sebelum lepas landas. Tidak dijelaskan mengapa Thunberg diterbangkan ke Prancis, bukan ke negara asalnya, Swedia.

Otoritas Israel mengatakan pada Selasa (10/6/2025) bahwa Thunberg dan para aktivis lainnya, yang ditahan di atas kapal yang berlayar menuju ke Jalur Gaza, telah dibawa ke bandara Ben Gurion di Tel Aviv untuk dideportasi.

Kapal bernama Madleen yang dioperasikan oleh kelompok aktivis Freedom Flotilla Coalition dan membawa bantuan kemanusiaan simbolis untuk Jalur Gaza itu dicegat oleh pasukan Angkatan Laut Israel sebelum berhasil mencapai daerah kantong Palestina tersebut.

Kapal yang berangkat dari Italia pada 1 Juni lalu itu dicegat pasukan Tel Aviv di perairan internasional dekat Jalur Gaza pada Senin (9/6/2025) dan dialihkan ke pelabuhan Ashdod, Israel. Tel Aviv menyebut kapal Madleen itu sebagai "selfie yacht" dan para aktivis yang ada di dalamnya sebagai "selebriti".

"Para penumpang 'Selfie Yacht' telah tiba di bandara Ben Gurion untuk meninggalkan Israel dan kembali ke negara asal mereka," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel.

"Mereka yang menolak untuk menandatangani dokumen deportasi

dan meninggalkan Israel akan dibawa ke hadapan otoritas peradilan," imbuh pernyataan tersebut.

Freedom Flotilla Coalition, dalam pernyataannya, menyebut 12 aktivis yang ada di kapal Madleen "sedang diproses untuk dipindahkan ke tahanan otoritas Israel" dan "mereka mungkin diizinkan terbang meninggalkan Tel Aviv paling cepat malam ini.

Di antara 12 aktivis yang ada di kapal tersebut, terdapat Thunberg dan seorang anggota Parlemen Eropa asal Prancis, Rima Hassan, kemudian dua jurnalis bernama Omar Fayyad dari Al Jazeera dan Yanis Mhamdi dari publikasi online Blast.

Situs resmi Freedom Flotilla menyebutkan bahwa kapal itu membawa 12 orang dari tujuh negara, termasuk Prancis dan Turki.

Diketahui Swedia pada Senin (9/6/2025) mengaku tengah menjalin komunikasi dengan Israel setelah



Tangkapan layar dari video keamanan menunjukkan momen pasukan khusus Israel menaiki Madleen, kapal bantuan yang berupaya untuk mematahkan blokade Israel terhadap Gaza, pada Senin (9/6/2025). Aktivis iklim Swedia Greta Thunberg terlihat di sebelah kiri kabin kapal dengan tangan terangkat sambil mengenakan topi hijau. (Freedom Flotilla Coalition via Courthouse News)

rezim Zionis mencegah kapal bantuan ke Gaza di perairan internasional dan menahan penumpangnya, termasuk aktivis iklim Greta Thunberg.

Kantor pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Swedia mengatakan pihaknya terus memantau situasi usai Israel menahan sejumlah aktivis di atas kapal bernama Madleen itu.

"Kementerian Luar Negeri dan perwakilan terkait di luar negeri telah mengetahui situasi ini dan sedang memantau perkembangannya," ujar kantor tersebut dalam pernyataannya.

Disebutkan, Kemlu Swedia dan Kedutaan Besar Swedia di Tel Aviv saat ini tengah berkomunikasi dengan

otoritas setempat dan mengikuti perkembangan secara seksama.

Pada Senin pagi, kapal Madleen yang berbendera Inggris dicegat dan digeledah oleh pasukan Israel sebelum mencapai Gaza. Kapal itu kemudian ditarik ke pelabuhan Israel.

"Jika bantuan konsuler dibutuhkan, Kedutaan Besar dan Kementerian Luar Negeri akan mengevaluasi cara terbaik untuk memberikan bantuan kepada warga negara Swedia," sebut pernyataan itu.

Kapal tersebut mengangkut 12 orang untuk misi kemanusiaan, yang terdiri dari 11 aktivis dan seorang jurnalis. (AFP, Al Jazeera, Reuters, Antara, ist/nei)

Langgar Hukum Internasional Lagi

PASUKAN Israel mencegah perjalanan kapal Madleen yang membawa bantuan kemanusiaan ketika akan mendekati Pantai Gaza, Senin (9/6/2025) dini hari waktu setempat.

Kapal Madleen adalah bagian dari Koalisi Freedom Flotilla, sebuah aliansi internasional yang terdiri dari para aktivis dan kelompok-kelompok yang berdedikasi untuk menentang blokade maritim atas Gaza.

Meskipun banyak upaya Israel untuk mengintervensi, koalisi ini tetap menyelenggarakan pelayaran yang bertujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Kondisi tersebut menarik perhatian pada situasi kemanusiaan di wilayah yang diblokade tersebut.

Mengenai hal ini, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono bersuara lantang. Ia mengutuk keras pencegahan kapal Madleen yang mengangkut bantuan ke Gaza dan penculikan para relawannya sebagai pelanggaran baru oleh rezim Zionis Israel terhadap hukum internasional.

"Saya mengancam keras intersepsi

kapal Madleen oleh Israel di perairan internasional saat mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Tindakan yang menunjukkan ketidakpedulian Israel terhadap hukum internasional dan menjadi pukulan berat bagi penderitaan rakyat Gaza," ujar Sugiono seperti dikutip dalam platform X, Selasa (10/6/2025).

Menurutnya, blokade Israel di darat dan laut adalah bentuk hukuman kolektif yang memper-buruk risiko kelaparan massal di Palestina. Sesuai hukum internasional dan instruksi Mahkamah Internasional atau ICJ, Israel wajib memastikan bantuan kemanusiaan tersalur secara berkelanjutan dan tanpa hambatan. Serta menjamin keselamatan pekerja kemanusiaan.

Namun ia mengapresiasi upaya aktivis internasional yang membuka koridor maritim untuk penyaluran bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Tapi hal ini tidak mengalihkan fokus dari akses bantuan melalui jalur darat yang tetap menjadi kebutuhan paling mendesak.

"Di berbagai forum, saya selalu serukan bahwa pembukaan semua jalur bantuan ke Gaza adalah keharusan," tulis Sugiono.

Indonesia senantiasa menyerukan keharusan pembukaan semua jalur bantuan ke Gaza. Sugiono akan menyuarakan tuntutan ini kembali di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada gelaran KTT Palestina mendatang di New York, ia menyerukan komunitas internasional khususnya DK PBB untuk bertindak tegas, yaitu melindungi warga sipil dan adopsi resolusi untuk akhiri blokade serta menjamin akses kemanusiaan.

Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan kapal Madleen sedang diarahkan ke pantai Israel dan para penumpang diperkirakan akan dideportasi ke negara asalnya. Kementerian menolak misi tersebut sebagai aksi media dan menegaskan bantuan secara teratur dikirim ke Gaza melalui saluran yang telah ditetapkan, dan menegaskan blokade angkatan laut adalah legal berdasarkan hukum internasional. (antara, ist/nei)

Bahaya Konsumsi Makanan Pedas Setiap Hari

Mengonsumsi makanan pedas setiap hari mungkin terasa menggoda, terutama bagi kamu pencinta rasa pedas yang kuat dan menggugah selera. Sensasi pedasnya bisa membuat makan jadi lebih nikmat dan meningkatkan nafsu makan. Namun, tahukah kamu bahwa jika dikonsumsi secara berlebihan, makanan pedas juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang serius?

Beberapa penelitian membuktikan bahwa terlalu banyak makan makanan pedas dalam jangka panjang bisa berdampak buruk bagi tubuh. Mulai dari gangguan pencernaan, sakit kepala, sampai gangguan berat badan. Nah, kalau kamu termasuk pencinta pedas sejati, cek dulu apa saja dampak buruk makanan pedas yang harus kamu waspadai!

Mengganggu Sistem Pencernaan

Salah satu efek paling umum dari konsumsi makanan pedas berlebihan adalah gangguan pencernaan. Capsaicin dalam cabai bisa menyebabkan sensasi terbakar di saluran pencernaan. Akibatnya, kamu bisa merasakan mual, mulas, atau nyeri perut.

Penelitian di Current Medicinal Chemistry juga mencatat hubungan capsaicin dengan gejala heartburn. Selain itu, studi dari Experimental Cell Research menyebutkan bahwa konsumsi capsaicin dalam jumlah besar bisa memicu rasa mual dan perut terasa tidak nyaman.

Kalau kamu pernah merasa perut seperti dikocok atau panas setelah makan pedas, itu tandanya pencernaanmu sudah mulai terganggu. Mungkin sesekali tidak masalah, tapi rutin konsumsi makanan pedas jelas bukan ide

yang baik untuk jangka panjang.

Memperparah Maag dan Tukak Lambung

Banyak orang mengira makanan pedas menyebabkan maag, padahal faktanya tidak selalu begitu. Namun, konsumsi makanan pedas berlebihan bisa memperparah kondisi lambung yang sudah lemah.

Kalau kamu punya gastritis atau tukak lambung, makan pedas bisa memperburuk gejalanya. Menurut studi dari Critical Reviews in Food Science and Nutrition, makanan pedas memang tidak menyebabkan tukak secara langsung, tapi bisa memperburuk iritasi yang sudah ada.

Bisa Menyebabkan Kenaikan Berat Badan

Kamu mungkin bertanya-tanya, bukankah makanan pedas bisa bantu diet? Memang benar, beberapa rempah seperti cabai merah bisa meningkatkan metabolisme. Tapi masalahnya, banyak makanan pedas yang justru tinggi lemak dan karbohidrat. Misalnya, ayam geprek, mie pedas jumbo, atau sambal goreng yang kaya minyak.

Selain itu, konsumsi makanan pedas juga sering memicu keinginan untuk makan manis setelahnya. Akibatnya, kamu bisa mengonsumsi kalori berlebihan tanpa sadar. Dalam jangka panjang, hal ini justru bisa memicu penambahan berat badan. Jadi, rutin konsumsi makanan pedas bukan solusi ideal untuk menjaga berat badanmu tetap stabil.

Bisa Menyebabkan Diare

Pernah merasakan perut melilit setelah makan pedas? Itu bukan hal langka. Ketika kamu makan makanan dengan tingkat kepedasan tinggi, sistem pencernaanmu akan mempercepat proses ekskresi. Hasilnya, kamu bisa mengalami diare atau buang air besar dengan sensasi panas yang tidak nyaman.

Hal ini terjadi karena capsaicin bisa merangsang saraf di saluran pencernaan. Ketika saraf tersebut aktif, usus besar akan bekerja lebih cepat, menyebabkan proses pencernaan menjadi terburu-buru. Akibatnya, air dalam usus belum terserap dengan baik dan kamu pun harus bolak-balik ke toilet.

Memicu Sakit Kepala Hebat

Kalau kamu pernah merasakan sakit kepala setelah menyantap cabai super pedas, kamu tidak sendiri. Beberapa jenis makanan super pedas bisa memicu thunderclap headache, yaitu sakit kepala mendadak yang intens. Salah satu kasus yang dilaporkan di BMJ menyebutkan seorang pria mengalami penyempitan pembuluh darah otak setelah makan cabai terpedas di dunia.

Sakit kepala ini terjadi karena perubahan mendadak aliran darah di otak. Meskipun jarang terjadi, ini bisa menjadi dampak serius dari konsumsi makanan pedas berlebihan.

Tubuh Mudah Berkeringat

Makanan pedas membuatmu berkeringat? Itu reaksi alami tubuh saat bereaksi terhadap

capsaicin. Senyawa ini mengaktifkan reseptor panas di mulut dan saluran pencernaan. Akibatnya, otak merespons seolah-olah kamu sedang terbakar, lalu memerintahkan tubuh untuk menurunkan suhu dengan cara berkeringat.

Menurut penelitian dari Dr. David Julius, pemenang Nobel dalam bidang fisiologi, capsaicin meniru efek panas dan mengaktifkan sistem saraf yang membuatmu berkeringat. Meski tidak berbahaya, kondisi ini bisa mengganggu aktivitas, terutama kalau kamu sedang di luar ruangan atau memakai pakaian tebal. Bahkan beberapa orang bisa mengalami wajah merah, mata berair, dan hidung meler hanya karena rutin konsumsi makanan pedas setiap hari.

Mengurangi Sensitivitas Lidah

Terlalu banyak makan makanan pedas bisa mengurangi sensitivitas lidah dalam mengecap rasa, bahkan bisa membuat sensitivitas lidah berangsur hilang. Jika sensitivitas berkurang, lidah tidak lagi berfungsi optimal untuk menentukan porsi makanan pedas yang dapat ditolerir.

Insomnia

Saat kamu makan makanan pedas, suhu tubuh akan meningkat. Itulah mengapa tubuh kamu berkeringat setelah makan makanan pedas. Studi yang dipublikasikan dalam The International Journal of Psychology menyebutkan bahwa bahaya makan pedas bisa melukai perut dan mengaktifkan hormon kimia yang bisa membuat kamu terjaga di malam hari. (nei,ist/dya)



DeepSeek Gunakan Gemini untuk Latihan AI Terbaru

DeepSeek-R1-0528, model kecerdasan buatan terbaru dari DeepSeek, diduga kuat menggunakan model turunan dari Gemini milik Google sebagai dasar pelatihannya.

Dugaan ini muncul setelah sejumlah pengamat mencatat adanya kemiripan dalam respons dan performa antara DeepSeek-R1-0528 dan model Gemini. Model ini disebut-sebut memiliki kemampuan tinggi dalam memahami konteks kompleks dan menjawab dengan presisi layaknya model besar lainnya di industri.

Sam Paech, seorang analis AI, turut meneliti lebih dalam dengan menggunakan alat bioinformatika untuk menguji sistem DeepSeek. Dalam proses penelusurannya, Paech mengurai garis keturunan dari model DeepSeek dan menemukan pola-pola respons yang sangat mirip dengan milik Gemini.

Kesimpulan tersebut memperkuat dugaan bahwa DeepSeek-R1-0528 kemungkinan besar dibangun di atas fondasi model yang dikembangkan oleh Google, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait.

"Jika Anda bertanya mengapa Deepseek R1 baru terdengar sedikit berbeda, saya pikir mereka mungkin beralih dari pelatihan OpenAI sintetis ke keluaran Gemini sintetis," begitu cuitan Paech di akun X pada Jumat, 30 Mei 2025.

Paech juga melakukan peninjauan terhadap situs komunitas pengembang Hugging Face, yang dikenal sebagai platform kolaborasi open source bagi para pengembang

kecerdasan buatan.

Di platform ini, para kontributor dari berbagai belahan dunia berbagi model, data, dan alat bantu yang digunakan dalam pengembangan teknologi machine learning.

Analisis lebih lanjut dilakukan melalui akun GitHub milik Paech, yang berisi berbagai proyek dan kode sumber yang pernah dikembangkan atau dikontribusikannya.

Melalui akun ini, dapat ditelusuri jejak aktivitasnya dalam komunitas pengembangan, termasuk keterlibatannya dalam proyek open source yang berhubungan dengan ekosistem Hugging Face.

DeepSeek merilis pembaruan model DeepSeek-R1-0528 melalui Hugging Face pada Mei 2025 Perusahaan mengklaim penalaran AI model ini semakin dalam. Kecerdasan buatan ini juga memanfaatkan peningkatan sumber daya komputasi, serta memperkenalkan mekanisme pengoptimalan algoritmik selama pasca-pelatihan.

Model teranyar DeepSeek ini menunjukkan kinerja luar biasa pada berbagai evaluasi tolok ukur, mencakup matematika, pemrograman, dan logika umum. "Kinerja keseluruhannya sekarang mendekati kinerja model terkemuka, seperti o3 milik OpenAI dan Gemini 2.5 Pro," begitu pernyataan DeepSeek dalam Hugging Face.

Sam Paech juga menampilkan tangkapan layar EQ-Bench soal hasil evaluasi model AI. Di situ terlihat rentetan pecahan model pengembangan Google, yaitu Gemini 2.5 Pro, Gemini 2.5 Flash, dan Gemma 3.

Mengutip TechCrunch, bukti hasil pelatihan oleh Gemini ini belum kuat, meski ada sejumlah pengembang lain juga mengaku menemukan jejak Gemini. Tuduhan pelatihan

melalui data model AI pesaing ini juga pernah menyasar DeepSeek pada Desember 2024. Pada bulan Desember, beberapa pengembang aplikasi mengamati bahwa model V3 DeepSeek sering mengidentifikasi dirinya sebagai ChatGPT. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

MEDIA TERVERIFIKASI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Warna Rambut Ombre ini Cerahkan Kulit Sawo Matang

Jika kamu ingin terlihat lebih segar tanpa harus melakukan perubahan besar, teknik pewarnaan rambut ombre bisa jadi opsi yang pas. Teknik ini menampilkan gradasi warna dari bagian atas rambut yang gelap hingga bagian ujung yang lebih terang.

Memilih warna ombre sebaiknya disesuaikan dengan warna kulit agar tampilan terlihat lebih cerah dan bercahaya. Bagi pemilik kulit sawo matang, Southern Living menyarankan menggunakan warna dasar seperti hitam atau coklat, lalu dipadukan dengan warna-warna ombre yang lebih berani untuk hasil yang memukau.

Sebagaimana dijelaskan dalam laman Southern Living, kulit sawo matang cocok mengombre rambut gelap dengan warna yang senada atau lebih berani. Berikut rekomendasi warnanya:

Cokelat - Caramel

Perpaduan warna coklat gelap dan caramel terang menciptakan harmoni yang elegan dan natural. Karena berada dalam satu tone warna yang serupa, kombinasi ini memberikan gradasi lembut yang menyatu tanpa terlihat kontras.

Warna caramel yang terang mampu memberikan dimensi dan efek kilau pada rambut, sementara coklat gelap memberikan kesan hangat dan mendalam. Hasil akhirnya, rambut akan tampak lebih bercahaya, sehat, dan memancarkan nuansa mewah namun tetap alami.

Hitam - Abu-abu

Abu-abu termasuk salah satu warna rambut yang tengah naik daun dan menjadi favorit banyak orang belakangan ini. Warna ini memberikan kesan modern, edgy, sekaligus elegan, cocok untuk kamu yang ingin tampil beda namun tetap stylish.

Salah satu cara terbaik untuk mengaplikasikan warna abu-abu adalah dengan teknik ombre. Gunakan warna hitam sebagai dasar di bagian akar hingga tengah rambut, lalu transisikan secara halus ke warna abu-abu di bagian ujung. Teknik ini menciptakan efek gradasi yang lembut namun mencolok.

Selain memberikan tampilan yang lebih segar, ombre abu-abu juga bisa membuat rambut terlihat lebih berdimensi, bercahaya, dan bersinar. Kombinasi hitam dan abu-abu ini sangat cocok untuk berbagai warna kulit dan mudah dipadukan dengan berbagai gaya fashion.

Cokelat - Blonde

Transisi dari warna coklat ke blonde akan menciptakan kontras yang mencolok namun tetap elegan. Kombinasi ini sering menjadi pilihan bagi mereka yang ingin tampil menawan tanpa harus mewarnai seluruh rambut secara drastis. Gradasi dari coklat ke blonde memberikan dimensi yang membuat rambut terlihat lebih tebal dan bercahaya, terutama saat tertimpa cahaya. Teknik ini juga cocok untuk berbagai gaya dan panjang rambut, baik lurus, bergelombang, maupun keriting.

Hitam - Cokelat Tua

Warna ombre dari hitam ke coklat tua adalah pilihan yang sempurna bagi kamu yang ingin tampil elegan tanpa terlihat terlalu mencolok. Gradasi warna ini memberikan tampilan yang halus dan alami, karena kedua warna masih berada dalam spektrum warna yang serupa. Hitam sebagai warna dasar memberi kesan kuat dan klasik, sementara coklat tua di bagian ujung menambahkan nuansa hangat yang membuat keseluruhan tampilan lebih lembut dan bersahaja.

Cokelat - Auburn

Auburn adalah warna pirang dengan semburat kemerahan yang unik dan memikat, sering kali

diibaratkan seperti langit saat matahari terbenam. Warna ini memancarkan kehangatan sekaligus kesan elegan yang tidak berlebihan. Nuansa kemerahan dalam auburn memberikan kesan segar dan hidup, cocok untuk kamu yang ingin tampil berbeda namun tetap terlihat natural.

Cokelat - Honey

Pilih warna honey atau madu yang terang, lalu padukan dengan coklat muda sebagai warna dasar untuk menciptakan tampilan rambut yang hangat dan menawan. Kombinasi ini menghasilkan transisi warna yang lembut dan natural, namun tetap mampu menarik perhatian berkat kilau manis dari nuansa honey. Perpaduan ini cocok untuk kamu yang ingin tampil segar tanpa terlalu mencolok, serta memberikan kesan rambut yang lebih bercahaya dan berdimensi.

Hitam - Honey

Jika kamu ingin warna honey lebih menonjol pada rambutmu, cobalah teknik ombre dengan menggunakan ramb

ut hitam sebagai dasar. Perpaduan ini menciptakan kontras yang cantik sekaligus alami, membuat warna honey tampak lebih bersinar dan mencuri perhatian. Efek gradasinya akan memberikan kilau keemasan yang hangat, menyerupai suasana di p a n t a i s a a t m a t a h a r i tenggelam—romantis, lembut, dan memikat.(nei,ist/dya)



Karpet Merah BUMN (dari Hal 1) ...

Pemerintah tetap mengizinkan tambang PT GAG Nikel beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, meski dikritik oleh publik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia Selasa (10/6/2025) mengatakan, pemerintah memutuskan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat dari lima perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat. Mereka yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham.

Pencabutan diumumkan setelah sehari sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan para menternya di kediaman pribadinya di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/6/2025).

Bahlil mengungkapkan, PT GAG tetap diizinkan beroperasi karena berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, perusahaan mematuhi aturan lingkungan hidup dan tata kelola limbah yang baik sesuai analisis mengenai dampak lingkungan hridup (Amdal).

"Dan tadi kan sudah lihat fotofotonya pas meninjau itu. Alhamdulillah sesuai dengan Amdal. Sehingga karena itu juga adalah bagian dari aset negara selama kita awasi betul. Arahan Bapak Presiden kita harus awasi betul lingkungannya. Sampai dengan sekarang kami berpandangan tetap akan bisa berjalan," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Namun, Bahlil enggan berkomentar ketika dikonfirmasi pertambangan di pulau kecil melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Beleid ini dengan gamblang mendefinisikan bahwa pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya. Sementara Pulau Gag, salah satu dari gugus pulau Raja Ampat yang ditambang, memiliki luas 6 ribu hektare yang setara 60 km².

Pasal 23 ayat (2) beleid ini menyatakan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan konservasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; budidaya laut; pariwisata; usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; pertanian organik dan peternakan; dan pertahanan dan keamanan negara.

Adapun di luar tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib

memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan dan kelestarian, sistem tata air setempat, dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

Bahlil mengatakan alasan kontrak karya PT GAG tidak dicabut karena jauh dari kawasan geopark. Kendati PT Gag tidak dicabut, Bahlil mengatakan pemerintah akan mengawasi ketat operasinya.

Bahlil sebelumnya mengatakan bahwa kegiatan pertambangan PT GAG Nikel di Raja Ampat diklaim tidak berada dalam wilayah konservasi. Ia menjelaskan bahwa lokasi tambang berada di Pulau Gag, sekitar 30 hingga 40 kilometer dari Pulau Piaynemo, yang dikenal sebagai destinasi wisata utama di Raja Ampat.

"Banyak yang bilang tambang ada di Piaynemo, itu keliru. Tambangnya di Pulau Gag, cukup jauh dari sana. Saya tahu karena saya sering ke Raja Ampat," kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Jumat, (6/6/2025).

Dia memutuskan untuk menghentikan sementara operasi PT GAG Nikel sejak Kamis, 5 Juni 2025, sambil menunggu hasil verifikasi langsung di lapangan. "Untuk sementara kami hentikan sampai kami cek langsung kondisi di lapangan."

Diketahui PT Gag Nikel yang mengantongi izin operasi produksi sejak 2017. Izin operasi berdasarkan SK Menteri ESDM Nomor 430.K/30/DJB/2017 yang berlaku hingga 30 November 2047. Bahlil mengklaim pemegang Kontrak Karya (KK) Generasi VII dengan luas wilayah 13.136 hektare di Pulau Gag ini telah memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pada 2014, lalu adendum Amdal pada 2022, serta Adendum Amdal Tipe A yang diterbitkan tahun lalu oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sementara izin yang dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP). IUP Operasi Produksi PT ASP diterbitkan pemerintah pusat, yakni melalui SK Menteri ESDM Nomor 91201051135050013 yang diterbitkan pada 7 Januari 2024 dan berlaku hingga 7 Januari 2034. Perusahaan ini memiliki wilayah operasi seluas 1.173 hektare di Pulau Manuran. Untuk aspek lingkungan, PT ASP telah memiliki dokumen Amdal pada 2006 dan UKL-UPL pada tahun yang sama dari Bupati Raja Ampat.

Kemudian, PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) yang mengantongi IUP dari SK Bupati Nomor 153.A Tahun 2013. SK tersebut berlaku selama 20 tahun hingga 26 Februari 2033 dan mencakup wilayah 2.193 hektare di Pulau Batang Pele. Menurut catatan Kementerian ESDM, kegiatan perusahaan ini masih dalam tahap eksplorasi (pengeboran) dan belum memiliki dokumen lingkungan maupun persetujuan lingkungan.

Selanjutnya, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan IUP diterbitkan oleh SK Bupati Nomor 290 Tahun 2013, yang berlaku hingga 2033 dengan wilayah seluas 5.922 hektare. Terkait dengan penggunaan kawasan, perusahaan tersebut memegang IPPKH berdasarkan Keputusan Menteri LHK tahun 2022. Kegiatan produksi dilakukan sejak 2023, tetapi saat ini tidak terdapat aktivitas produksi yang berlangsung.

Terakhir, PT Nurham yang memegang IUP berdasarkan SK Bupati Raja Ampat Nomor 8/1/IUP/PMDN/2025. Perusahaan ini memiliki izin hingga tahun 2033 dengan wilayah seluas 3.000 hektare di Pulau Waego. PT Nurham telah memiliki persetujuan lingkungan dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sejak 2013. Namun hingga kini perusahaan belum berproduksi.

Cuan Rp819 Miliar

PT GAG Nikel mencatat laba sebesar Rp819,77 miliar sepanjang periode 2021 dari konsesi tambang di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

Laba anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) itu lompat 192,47% dibandingkan dengan posisi laba tahun buku 2020 di angka Rp280,25 miliar.

Sementara itu, GAG Nikel mencatat pendapatan sepanjang 2021 mencapai Rp1,76 triliun, bergerak naik 167,85% dari posisi pendapatan tahun sebelumnya di angka Rp660,53 miliar.

Pertumbuhan laba dan pendapatan anak usaha Antam itu ditopang oleh kenaikan volume produksi dan penjualan selama 2 tahun terakhir.

GAG Nikel mencatat produksi sebesar 3 juta ton basah atau wet metric ton (wmt) pada 2021. Sementara itu, penjualan Gag Nikel mencapai 3.000.761 wmt pada periode tersebut.

Adapun, GAG Nikel mencatat produksi dan penjualan untuk tahun 2020 masing-masing sebesar 1,16 juta wmt dan 1,11 juta wmt.

Sepanjang 2021, Gag Nikel telah menyeter Rp346,67 miliar kepada negara dalam bentuk pajak. Sementara itu setoran ke negara dalam bentuk non pajak mencapai Rp188,26 miliar.

Diketahui, Gag Nikel dituding melanggar aturan ihwal pertambangan di Pulau Gag, yang masuk ke dalam kategori pulau kecil. Malahan, menurut Greenpeace, aktivitas tambang di Pulau Gag, Pulau Kawe dan Pulau Manuran telah memabat lebih dari 500 hektare (ha) hutan dan vegetasi alami khas. (wid,bis,kum,ist,tmo/dya)

Greenpeace Khawatir Izin Diterbitkan Lagi

GREENPEACE Indonesia mengatakan pemerintah perlu menerbitkan secara resmi surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel empat perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat, Papua Barat.

Kepala Global Greenpeace untuk Kampanye Hutan Indonesia, Kiki Taufik khawatir pemerintah justru menerbitkan izin baru untuk tambang nikel di Raja Ampat.

Terlebih ada preseden bahwa izin-izin yang sudah pernah dicabut lantas diterbitkan kembali, termasuk di Raja Ampat karena adanya gugatan dari perusahaan," kata Kiki dalam keterangan tertulis, Selasa (10/6/2025).

Kiki menyatakan pencabutan IUP empat perusahaan nikel tersebut menjadi langkah awal perlindungan kawasan tersebut dari industri nikel.

"Pencabutan empat IUP ini menjadi setitik kabar baik dan salah satu langkah penting menuju perlindungan Raja Ampat secara penuh dan permanen dari industri nikel yang mengancam lingkungan hidup dan ruang-ruang hidup masyarakat," kata

Kiki juga mengajak publik untuk terus mengawasi langkah pemerintah dalam merestorasi wilayah-wilayah yang sudah dirusak oleh pertambangan agar dikembalikan ke fungsi ekologisnya.

Kampanye #SaveRajaAmpat, kata dia, telah menjadi bukti nyata dan harapan bahwa ketika masyarakat terus bersuara dan bersatu, terbukti bisa mendesak serta menciptakan perubahan bersama-sama.

Greenpeace juga mendesak pemerintah untuk mengatasi konflik sosial yang muncul di tengah masyarakat karena keberadaan tambang.

Selain itu, Greenpeace juga mendesak pemerintah memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat yang sebelumnya menyuarakan penolakan terhadap tambang nikel di kawasan Raja Ampat. (wid,rls/dya)

RUSUH LOS ANGELES MELUAS, 2 WNI DITANGKAP IMIGRASI AS

Dua warga negara Indonesia (WNI) ditangkap di Los Angeles, California dalam operasi penindakan imigrasi oleh otoritas Amerika Serikat (AS) yang memicu demonstrasi besar-besaran.

Demo menolak kebijakan anti-imigrasi yang dilakukan Presiden Donald Trump tidak hanya terpusat di Los Angeles. Demo kini meluas hingga ke beberapa kota lainnya di AS.

Dikutip dari CNN, Selasa (10/6/2025), demo juga terjadi di wilayah California lain, Santa Ana, yang berada di tenggara Los Angeles. Demo juga terjadi di San Francisco. Sebanyak 150 pengunjung rasa ditangkap saat demo yang berlangsung pada Minggu (8/6/2025).

Di sisi lain, operasi penindakan imigrasi juga terus dilakukan. Sejak Jumat (6/6/2025), Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) dan otoritas imigrasi AS melakukan penggerebekan terhadap imigran di beberapa tempat di Los Angeles, seperti Garment District, Westlake, dan Los Angeles Selatan. Dua orang

WNI dikabarkan ikut terjaring dalam operasi tersebut.

"KJRI Los Angeles telah menerima informasi bahwa terdapat dua WNI yang ditahan dalam operasi tersebut," kata Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha dalam pernyataannya tertulisnya, Selasa (10/6/2025).

Dia mengatakan kedua WNI tersebut adalah seorang perempuan berinisial ESS (53) yang ditangkap karena statusnya tinggalnya di AS ilegal, dan seorang laki-laki berinisial CT (48) yang ditangkap karena memiliki riwayat pelanggaran narkoba dan masuk ke AS secara ilegal.

"KJRI Los Angeles saat ini sedang berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk akses pendampingan ke konsuleran bagi kedua WNI tersebut," kata Judha.

Di tengah semakin ketatnya penindakan imigrasi di AS, Kemenlu RI

mengimbau para WNI di negara itu untuk memastikan penggunaan visa yang sah dan sesuai peruntukannya, serta mematuhi peraturan setempat.

"WNI yang berencana bepergian ke AS diimbau untuk mengantisipasi pemeriksaan imigrasi yang lebih ketat saat tiba di sana," kata Judha dikutip dari Antara.

Kemenlu juga meminta WNI yang terdampak penindakan imigrasi AS untuk memahami hak-hak mereka dalam sistem hukum di negara itu, antara lain hak mendapat pendampingan penasihat hukum dan hak menghubungi perwakilan RI terdekat.

Judha mendorong WNI untuk segera menghubungi kontak pelindungan di enam perwakilan RI di seluruh AS atau menekan tombol darurat di aplikasi Safe Travel Kemenlu jika mengalami kesulitan atau menghadapi kondisi darurat selama berada di negara itu.

Merujuk pada akun media sosial DHS, inisial CT mengacu pada Chrissahdah Tooy. Tooy menjadi satu di antara 12 nama imigran ditangkap yang diumumkan oleh DHS.

"Pada tanggal 7 Juni 2025, ICE Los Angeles secara administratif menangkap Chrissahdah TOOY, 48 tahun, seorang warga negara Indonesia," tulis DHS di X.

Dalam pengumuman di medsos itu, DHS juga menuding Tooy memiliki catatan kriminal, seperti narkoba hingga menjadi imigran ilegal.

"Tooy memiliki riwayat kriminal yang mencakup hukuman atas kasus Narkoba, Mengemudi di bawah pengaruh, dan masuk secara ilegal," katanya.

Ratasan demonstran memenuhi Bandara Internasional Los Angeles (LAX), Senin, 9 Juni 2025, setelah larangan perjalanan baru Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, terhadap 12 negara mulai berlaku. Ketegangan meningkat di kota tersebut, dengan aksi unjuk rasa berlangsung di berbagai titik.

Melansir Mirror US, Selasa (10/6/2025), para pengunjung rasa berkumpul di LAX sambil memegang plakat bertuliskan, "Tidak ada larangan bagi Muslim, tidak ada larangan bagi Afrika" dan meneriakkan, "Imigran diterima di sini." Peristiwa ini terjadi delapan tahun setelah kekacauan meletus di beberapa bandara ketika Trump memberlakukan larangan perjalanan serupa dalam upaya menghentikan "teroris Islam radikal" datang ke AS. (wid,rls,mir,ist/dya)



Trump juga mengirim 700 Marinir AS ke Los Angeles untuk mengamankan demo. (Ist)

Trump Kirim 700 Marinir, Tambah Garda Nasional

untuk membantu melindungi properti dan personel federal, hingga lebih banyak pasukan Garda Nasional tiba di lokasi kejadian.

Dalam sebuah pernyataan, pihak militer menjelaskan bahwa "pengaktifan marinir" dimaksudkan untuk membantu memberikan pengamanan berkelanjutan di wilayah tersebut, untuk mendukung badan federal utama.

Sementara itu, pemerintah California yang menaungi wilayah Los Angeles, mengatakan personel marinir hanya akan dipindahkan ke pangkalan yang lebih dekat ke Los Angeles, dan secara teknis tidak dikerahkan ke jalanan. (rtr,ist,afp/dya)

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump mengerahkan 700 personel marinir dan menambah 2.000 pasukan Garda Nasional ke Los Angeles, gara-gara demonstrasi imigran yang sempat memanas.

Pengerahan pasukan tambahan itu dilakukan Trump setelah melihat para demonstran mengambil alih jalan-jalan di pusat kota LA pada Minggu (8/6/2025), membakar mobil, dan menjarah toko-toko di wilayah itu.

"Orang-orang yang menyebabkan masalah adalah agitator dan pemberontak," kata Trump kepada wartawan di Washington, seperti dikutip AFP, Selasa (10/6/2025).

Di media sosial, Trump juga menuduh para pengunjung rasa meludahi pasukan keamanan. Dia menegaskan jika para pedemo terus melakukan itu, maka tindakan tersebut tidak akan ditoleransi.

"Saya jamin mereka akan menerima pukulan lebih keras daripada sebelumnya. Tindakan tidak hormat seperti itu tidak akan ditoleransi," ujar Trump.

Trump mengaku merasa tidak punya pilihan lain selain memerintahkan pengerahan pasukan untuk mencegah tindak kekerasan agar tidak meluas dan tidak terkendali.

Komando Utara AS mengatakan satu batalion marinir akan dikirim



Akun medsos sosial DHS sebut WNI berinisial CT adalah Chrissahdah Tooy. (ist)